

Program Agraria Indonesia 60'an dan Relevansinya Kini

Resume Seri Diskusi Debat Agraria Sesi V

Pemantik Diskusi: Dianto Bachriadi Ph.D

Pada sesi-sesi diskusi sebelumnya berulang-ulang membahas tentang Jerman dan Rusia karena debat agraria pada awalnya berkembang diantara para pemikir Marxist di kedua negara tersebut. Paling tidak perdebatan ini menghasilkan dua pandangan utama yaitu masuknya kapitalisme di pedesaan menghilangkan 'petani' secara perlahan di pedesaan, serta petani bukanlah sebuah kelompok yang penting untuk diorganisir dalam rangka revolusi sosial. Karena perdebatan ini berlangsung diantara para pemikir marxist maka *keywords* yang paling penting adalah massa yang bisa diorganisir untuk revolusi sosial. Perdebatan agraria bermula dari perdebatan politik para politisi marxist di Jerman dan Rusia untuk melihat apakah petani ini penting dalam proses revolusi sosial dan bagaimana memperlakukan kelompok petani ini, baru kemudian perdebatan ini berkembang lebih akademik tentang perkembangan kapitalisme di pedesaan. Yang menarik dan menyenangkan dari tradisi pemikiran kiri adalah selalu mencari penjelasan-penjelasan teoritik dari sejumlah fenomena yang berkembang sebelum merumuskan aksi.

Aliran kedua dalam perdebatan itu mengatakan bahwa petani kecil tidak akan hilang dari muka bumi walaupun kapitalisme akan terus menggerus mereka, karena petani memiliki resistensi dan persistensi yang cukup kuat karena memiliki keunikan dalam aktivitas ekonomi dan sosial sebagai sebuah komunitas. Pemikiran ini diwakili Chayanov dan masih berkembang hingga kini dimana banyak para ahli mencoba membuktikan bahwa petani masih hidup dan bertahan.

Dalam konteks revolusi, pemikiran penting atau tidaknya petani menjadi perdebatan serius diantara para pemikir Partai Sosial Demokrat (SPD) atau Marxist di Jerman, yang sebagian menganggap tidak penting karena pada masa itu Jerman telah melangkah pada tahap masyarakat industri dan pertanian berbasis petani kecil sebagian sudah mulai menghilang. Tetapi berbeda dengan Revolusi Rusia yang banyak ditopang oleh para petani di pedesaan, bahkan Lenin menganggap revolusi sosial tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ditopang oleh kelompok petani. Dan kenyataan di negara-negara di luar Eropa seperti Asia dan Amerika Latin dimana masih masyarakat agraris bahwa revolusi sosial membutuhkan dukungan kelompok massa petani, bukan pada buruh perkotaan atau industri. Jadi relevansi mendiskusikan petani dan revolusi sosial di luar Eropa menjadi sangat signifikan.

Apa yang terjadi di Indonesia? Mengingat pemikiran Marx dan Lenin dalam hal ini komunisme sudah masuk di Indonesia pada awal abad 20 sejak masa kolonial dan menjadi cikal bakal atau pioner pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Apakah perdebatan dan pemikiran itu mempunyai imbas serta terpraktekkan di Indonesia. Kalau iya bagaimana hasilnya

“Untuk Bekerja lebih Baik di Kalangan Petani “merupakan buku fenomenal yang menjadi dasar penting pemikiran orang-orang kiri khususnya marxist/komunis di Indonesia untuk bekerja di pedesaan, yang berisi kumpulan tulisan Aidit, Asmu (Ketua BTI), Mao Tje Tjung, dan Lenin dan diterbitkan oleh PKI tahun 1960. Buku ini menegaskan tentang pentingnya kaum Marxist bekerja di pedesaan bersama dengan kalangan kaum tani.

Sebelum PKI terbentuk sebagai partai kiri Marxist pertama di Indonesia bahkan Asia, ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrat Indonesia) yang dipimpin Henk Snevliet terbentuk pada tahun 1918 sudah menempatkan kaum tani sebagai massa yang penting harus diorganisir untuk revolusi sosial sebagaimana pemikiran Lenin. Tetapi ISDV yang merupakan kelompok politik berbentuk perhimpunan cikal bakal partai dengan anggota kaum intelektual atau elit yang gemar berdiskusi dan kesulitan untuk bekerja melakukan pengorganisasian langsung karena tumbuh ditengah-tengah arus lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia di awal abad ke-20.

Organisasi pergerakan yang tidak berideologi kiri sudah tumbuh lebih dulu di Indonesia seperti Serikat Dagang Islam, meskipun hampir bersamaan di tahun 1905 Serikat Pegawai Kereta Api (Staatspoorwegen Bond, SS Bond) telah lahir dan kemudian tahun 1908 diperluas dengan perserikatan pegawai kereta api dan trem (Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel, VSTP) tapi masih kecil dan berkuat dengan konsolidasi organisasi. Tapi sebagai sebuah gagasan untuk mengorganisir petani sebenarnya sudah melekat dan muncul bersama dalam tumbuhnya ISDV sebagaimana terlihat dalam programnya dimana dari delapan (8) program terdapat dua (2) program yang menyangkut dengan petani, yaitu pada poin 1 dan 4 yang berisi sebagai berikut:

Poin 1. Berbunyi “Memperjuangkan kemerdekaan atas kehancuran kapitalisme. Kaum buruh dan tani karena senasib harus bersatu melawan.” Persatuan rakyat, buruh dan tani, sebagai alat perjuangan kelas merupakan pemikiran Lenin

Poin 4. Berbunyi “Membangun Koperasi untuk kaum tani.”

ISDV tidak piawai untuk mengorganisir massa di pedesaan khususnya petani, karenanya untuk menerapkan gagasannya mengorganisir petani mereka menggunakan strategi *block within* yaitu, “menginfiltrasi” kelompok-kelompok gerakan yang telah maju dalam pengorganisasian seperti Sarekat Islam (SI). SI bukan hanya mengorganisir di perkotaan tetapi juga memiliki basis-basis yang cukup kuat dan luas di pedesaan. Orang-orang ISDV masuk dalam SI, meradikalisasi SI dan membangun blok-blok didalamnya yang berideologi kiri. Jadi ISDV ingin mengubah SI sebagai sebuah organisasi gerakan menjadi sebuah organisasi yang berideologi kiri/marxist tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Ini merupakan sesuatu yang menarik, karena sejak munculnya komunisme di Indonesia tidak pernah mempertentangkan antara islam dengan komunisme atau ideologi kiri/marxist dengan agama, kecuali pada pertengahan tahun 1960-an ada pernyataan-pernyataan Aidit yang berdasarkan hasil riset PKI yang mulai mengarah pada pendeskreditan kelompok-kelompok agama. Tetapi harus juga dicatat bahwa PKI pernah menghukum kader-kadernya terutama di desa karena menghina pemimpin-pemimpin agama dan dihukum secara terbuka oleh partai.

Tetapi poin pentingnya bagi ISDV adalah bagaimana gerakan berbasis massa bisa masuk dalam pusaran gerakan perjuangan kelas untuk menumbangkan kapitalisme, Imperialisme, dan kolonialisme. Meski organisasi SI sudah maju, tetapi ISDV memandang bahwa agenda SI belum mengarah pada penumbangan kapitalisme, Imperialisme, dan Kolonialisme. Salah satu tokoh penting dalam upaya ISDV ini untuk menjadi bagian SI dan mempengaruhi garis perjuangannya adalah Semaoen.

Strategi ini cukup berhasil menyebabkan radikalisme SI meningkat, bahkan tokoh pendiri SI, Tjokroaminoto, yang awalnya tidak anti penjajahan mulai membicarakan anti imperialisme dan anti kapitalisme. Meskipun Tjokroaminoto sedikit ambigu ketika berpendapat mengenai kapitalisme, bahwa ada “kapitalisme yang haram dan kapitalisme yang halal” dimana maksudnya Kapitalisme yang haram adalah kegiatan ekonomi yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan asing sedangkan kapitalisme yang halal adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pribumi dan jangan digusur.

SI semakin condong ke kiri dan tuntutanannya semakin radikal, artinya ada keberhasilan yang cukup signifikan dari para organizer ISDV membangun blok politik dalam SI. Bahkan SI kemudian terbagi menjadi SI Putih dan SI Merah sebelum terpecah. SI Merah merupakan anggota-anggota SI yang telah menyatakan berideologi Marxist/Komunis.

Melalui SI, gagasan anti kolonialisme dan anti imperialisme ini tercermin dalam tuntutan-tuntutan, seperti penghapusan tanah partikelir, penghentian penyerobotan tanah rakyat untuk *onderneming*/perkebunan besar, menentang pajak-pajak yang memberatkan rakyat, menentang politik pembelian padi yang sering kali merugikan para petani, serta penghapusan atau pengurangan pajak hasil bumi dan sebagainya yang memberatkan petani. Ini merupakan suara-suara pertama gerakan sosial di pedesaan yang bercampur dengan gerakan nasionalisme di Indonesia yang mengartikulasi kepentingan kaum tani pada waktu itu.

Akibat radikalisisasi itu, pemberontakan kemudian terjadi dimana-mana. Meskipun pemberontakan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan akademik apakah pemberontakan-pemberontakan tersebut merupakan hasil dari proses radikalisisasi SI atau karena adanya penderitaan di kalangan petani di pedesaan yang membuatnya melakukan aksi spontan pemberontakan. Sejumlah kajian memang menunjukkan bahwa pemberontakan-pemberontakan tersebut memiliki jaringan sosial dengan para pemimpin SI di tingkat lokal maupun pusat kota (Jakarta, Bandung dan Semarang). Sehingga masih ada sejumlah pertanyaan yang menarik untuk menjadi kajian akademik apakah memang pemberontakan petani itu dilakukan dalam kerangka menolak kapitalisme atau imperialisme di pedesaan akibat radikalisisasi ajaran marxisme, atau gerakan menolak kolonialisme imperialisme, atau bahkan ini merupakan bagian dari gerakan nasionalis pro kemerdekaan, atau gerakan sosial spontan. Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa gerakan petani tersebut di akhir abad 19 masih berbasis lokal, dipimpin para Kyai, menggunakan isu agama sebagai poros penting dari perjuangannya tetapi mulai masuk warna-warna nasionalisme atau menjadi bagian dari gerakan menuju kemerdekaan sehingga merupakan gerakan Proto-Nasionalisme. Sebagai contoh gerakan pemberontakan petani garut di Cimareme yang dipimpin Haji Hasan adalah gerakan proto-nasionalisme. Argumen ini dibantah seorang peneliti dari Filipina, Fernando, yang mengkaji ulang apakah gerakan petani pada saat itu sudah masuk dalam gerakan proto-nasionalis, ternyata hasil analisisnya menyatakan bahwa pada masa itu gerakan-gerakan petani tersebut merupakan gerakan spontan perjuangan ekonomi akibat kebijakan kolonial di pedesaan yang merupakan kepentingan para tuan tanah yang sebagian besar merupakan para pemimpin agama. Karena yang paling dirugikan akibat kebijakan politik kolonial adalah para pemilik tanah sebelum mereka berbagi penderitaan dengan anggota komunitasnya dalam hal ini para penyakap, penggarap atau buruh tani yang bekerja di lahan yang dimilikinya, atau para pemilik tanah dan pemuka agama ini yang sebetulnya menjadi bagian dari para tengkulak hasil bumi. Karenanya wajar mereka menjadi pemimpin gerakan karena mereka mempunyai jaringan yang cukup luas dalam kelompok-kelompok agama sehingga dapat memobilisasi para pemimpin agama di wilayah lain untuk memperbesar gerakannya.

Melalui SI Merah yang kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang dibentuk H. Misbach di Semarang, ISDV yang kemudian di tahun 1920 berubah menjadi PKI mengklaim berhasil melakukan pengorganisasian kaum tani dengan cukup baik melalui Sarekat Rakyat. Meskipun Sarekat Rakyat tidak hanya mengorganisir di pedesaan tetapi juga di perkotaan.

Komintern di tahun 1924 mengkritik klaim PKI yang menyatakan keberhasilannya mengorganisir massa petani melalui Sarekat Rakyat. Bagi Komintern, Sarekat Rakyat merupakan organisasi perjuangan yang tidak jelas basis kelasnya karena keberagaman anggotanya. Komintern berpendapat bahwa revolusi sosial melalui perjuangan kelas tidak dapat ditumpukan pada organisasi yang "abu-abu" seperti Sarekat Rakyat ini, karena dalam teori marxist perjuangan kelas harus dipimpin oleh kaum proletar. Kritik ini kemudian ditindaklanjuti oleh Semaun, yang menulis pamflet "Kitab Tani (1925)" dengan nama samaran Wongso dan diterbitkan di Belanda, dengan mengusulkan dan mendorong agar PKI membentuk Serikat Petani yang terpisah dari Sarekat Rakyat dan juga dengan PKI, dengan usulan program sejumlah 23 buah. Program yang diusulkan ini merupakan cikal bakal pertama program agraria yang secara sistematis diusung organisasi gerakan petani di Indonesia. Di dalam program yang diusulkan tersebut mulai muncul istilah-istilah tanah untuk penggarap, landreform, pengurangan sewa tanah untuk penggarap perkebunan tebu, pengurangan pajak untuk petani, pembentukan koperasi, pembentukan bank desa, dan otonomi desa. Gagasan otonomi desa bahkan sudah muncul secara *genuine* dan bukan dari pemerintah Kolonial Belanda ketika pemerintah kolonial belanda menerapkan otonomi daerah. Semaun mengusulkan pembentukan "Komite Tani Sarekat Rakyat" sebagai persiapan untuk pembentukan Sentral Komite Tani Indonesia untuk Sarekat Tani.

Pada saat yang hampir sama di tahun 1923, SI yang sedang mengalami penurunan organisasi juga membentuk serikat khusus petani dengan nama yang sama yaitu Sarekat Tani. Tujuan

pendirian Sarekat Tani oleh SI untuk merevitalisasi pengorganisasian di pedesaan yang pada waktu itu mulai melemah akibat perpecahan anggotanya yang sebagian besar mulai beralih ke PKI.

Bersamaan dengan kritik Komintern terhadap PKI, Iwa Kusuma Sumantri (mantan rektor pertama Unpad Bandung) di Belanda dengan nama samaran S. Dingley menulis 'The Peasant Movement in Indonesia' dan akibat tulisan ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Belanda. Tulisan ini merupakan suatu risalah pertama tentang gerakan petani yang mencoba merekonstruksi gerakan petani di Indonesia. Dingley dalam tulisan semi ilmiah ini mengungkapkan dan walaupun sebagian datanya cukup kuat tetapi juga terdapat klaim-klaim bahwa serikat petani yang diorganisir kaum komunis saat itu cukup kuat dan ada beberapa aksi yang coba digalang dan dilakukan, dimana terdapat protes-protes bahkan pemberontakan-pemberontakan petani yang tidak hanya berlangsung di Jawa, tetapi juga berlangsung di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, bahkan di Aceh. Apakah protes-protes yang berujung pemberontakan-pemberontakan petani ini merupakan hasil dari pengorganisasian kaum komunis tentu kembali masih menjadi pertanyaan-pertanyaan ilmiah.

Akibat protes-protesnya, serikat tani kiri ini mulai mendapatkan represi hebat dari pemerintah kolonial. Terlebih setelah apa yang menurut kaum kiri merupakan sebuah 'penyelewengan' yang mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan petani di Banten tahun 1926 dan di Silungkang tahun 1927, represi pemerintah kolonial Belanda menjadi nyata terhadap PKI dengan penangkapan para tokoh disertai pembuangan ke Boven Digul dan pembunuhan di penjara-penjara kolonial terhadap para tokoh gerakan tersebut. Tidak hanya itu saja, Sekolah Rakyat yang didirikan dan menjadi basis Sarekat Rakyat di berbagai daerah hingga ke wilayah pedesaan dibekukan dan dianggap sebagai sekolah ilegal. Sekolah Rakyat ini merupakan bagian penting dari sejarah pendidikan di Indonesia selain juga Taman Siswa yang didirikan oleh Soewardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. PKI oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian dibekukan dan dinyatakan sebagai organisasi ilegal. Sejak itu PKI harus kembali bekerja di bawah tanah dan pengorganisasian petani yang baru saja dilakukan menghilang dari dinamika gerakan sosial kiri hingga kemudian nanti muncul di tahun 1950-an. Dengan hilangnya gerakan petani yang dimotori kaum kiri ini, wacana 'the agrarian questions' di Indonesia juga menghilang.

Masalah agraria muncul kembali pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 setelah adanya Maklumat Wakil Presiden RI yang mendorong tokoh-tokoh pergerakan membangun partai politik untuk menjelang pemilu di tahun 1955. Munculnya partai-partai politik ini juga melahirkan serikat tani sebagai alat pengorganisasian politik, yang pertama adalah lahirnya Barisan Tani Indonesia (BTI) disusul oleh Rukun Tani Indonesia (RTI) dan kemudian Sarekat Tani Indonesia (SAKTI). Ketiga Organisasi Tani di isi oleh para aktivis yang berideologi marxist/kiri meskipun tidak semua aktivis organisasi tani ini berideologi tersebut. Sementara itu tumbuh juga serikat-serikat petani yang lain yang para aktivisnya tidak berideologi marxist/kiri, seperti Pertanu, Petani, Serikat Petani Islam Indonesia.

Yang menarik dari munculnya BTI adalah agenda perjuangannya dengan slogan 'Hak Negara atas Semua Tanah', ini merupakan gagasan penghapusan atas hak milik pribadi sehingga semua tanah dikuasai oleh negara yang bercampur dengan keinginan untuk menghilangkan *onderneming* atau perkebunan besar yang menjadi mesin ekonomi utama dari kolonialisme di Indonesia. Isu yang dilontarkan BTI ini tidak disukai oleh para petani terutama para petani pemilik tanah yang merasa terancam kepemilikan tanahnya diambil negara, sehingga organisasi ini tidak membesar karena ketiadaan dukungan dari massa petani sendiri. Begitu juga dengan RTI yang kurang mendapatkan dukungan dari petani meskipun RTI melontarkan gagasan dengan slogan yang lebih cerdas yaitu 'Nasionalisasi Semua Tanah'. Gagasan RTI lebih mengedepankan penguasaan tanah-tanah yang bukan dikuasai oleh pribumi harus dinasionalisasi.

Aidit sebagai tokoh PKI mengkritik agenda kedua organisasi tersebut yang menurutnya justru menjauhkan kaum tani dari organisasi gerakan petani. Menurutnya lebih tepat jika agendanya adalah Tanah untuk Kaum Tani, Pembagian Tanah untuk Kaum Tani, dan Kepemilikan Tanah untuk Perseorangan. Gagasan Aidit ini menuai kritik yang cukup keras karenanya gagasannya mengakui kepemilikan individual atas tanah sebagaimana yang selama ini ditentang oleh kaum marxist mengenai private property. Tetapi gagasan Aidit ini juga mendapatkan banyak dukungan dari kalangan muda dalam partai. Hingga kemudian Komite Central PKI dikuasai Aidit dan kawan-kawan (terutama didukung Nyoto dan Alimin) melalui apa yang dikenal dengan 'Politbiro Jalan baru' dan Aidit disahkan menjadi Sekjen di tahun 1954, gagasan Aidit mengenai petani dan reforma agraria menjadi program partai. Gagasan mengenai pengorganisasian petani ini sendiri pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan Aidit di koran Bintang Merah (koran milik PKI) di tahun 1951 (Aidit, Masalah Tani di Indonesia, Bintang Merah 1951) serta tulisan pada tahun 1953 berjudul 'Hari Depan Gerakan Tani Indonesia' di koran tersebut. Tulisan ini kemudian menjadi dasar filosofi untuk program reforma agraria dan pengorganisasian petani oleh partai. Beberapa hal yang menjadi pikiran untuk analisis program reforma agraria yaitu:

- 1) Indonesia berada dalam tahapan Semi feodal, ditandai dengan kepnyakapan dan bagi hasil yang tidak seimbang dan didominasi oleh kepentingan pemilik tanah besar/tuan tanah serta tumpukan hutang kaum tani kepada tuan tanah atau lintah darat. Tidak sepenuhnya feodal tetapi warna-warna perbudakan masih kental dalam relasi produksi antara petani, buruh dan pemilik tanah.
- 2) Lahirnya Agrarische wet 1870 dengan azas *domeinverklaring* tidak menghapuskan hakekat sistem milik dan persewaan tanah yang ruwet di Indonesia dimana penghisapan feodal atas kaum tani masih berlangsung. Peraturan ini hanya memperkenalkan, menambahkan dan memudahkan investor atau pemilik modal menguasai tanah-tanah negara untuk perkebunan-perkebunan. Tuan tanah pribumi dan asing tetap mempunyai kekuasaan atas tanah-tanah yang dimilikinya. Buktinya hak atas tanah dalam bentuk erpacht dengan mudah dapat diperpanjang, sehingga ini hanya memudahkan pengalihan tanah-tanah negara kepada investor/pemilik modal
- 3) Akibat dari masih adanya sisa-sisa feodalisme, tehnik pertanian tidak berkembang dan kaum tani bekerja dengan hasil tidak memadai, sehingga pasar dalam negeri makin merosot yang menyebabkan industri tidak berkembang. Sementara, hasil produksi pertanian yang berkembang di perkebunan-perkebunan besar yang hasilnya di ekspor, keuntungannya tidak kembali lagi ke Indonesia karena hasilnya menjadi milik para pemilik modal asing.
- 4) Kenyataan yang berlangsung, prinsip kepemilikan individual atas tanah sangat berakar di Indonesia, hal ini jangan dilanggar. Jika hendak mengajak kaum tani, revolusi hanya bisa dipahami petani jika revolusi mengambilalih tanah-tanah para tuan tanah dan membagikannya kepada petani sebagai hak milik pribadi. Tuan tanah dihapuskan tetapi tanah-tanah tersebut tidak menjadi tanah negara melainkan dibagikan kepada para petani sebagai hak milik pribadi. Perlu dicatat pula bahwa hal ini merupakan upaya partai juga untuk bersaing dengan partai lainnya di masa tersebut untuk menarik simpati massa terutama massa petani di pedesaan untuk pemilu di tahun 1955 atau sesudahnya.
- 5) Pandangan ini memang terdapat kontradiksi bagi kaum Marxist, terutama mengenai hak milik perorangan. Untuk mengatasi kontradiksi tersebut, Aidit menyatakan Jika kader partai bekerja serius di pedesaan dalam mendidik petani untuk revolusi, maka petani-petani kecil itu sendiri yang menyadari bahwa lahan-lahan kecil tidak menguntungkan sehingga perlu menyatukan lahan-lahan pertanian dan alat-alat kerja kaum tani ke dalam satu pertanian kolektif. Jadi Biarkan praktek mengubah sendiri kepentingan petani kecil untuk menguasai tanah secara pribadi, karena perkembangan ekonomi kapitalis akan membuat mereka kalah jika tidak menjadi unit produksi yang besar seperti yang telah dijelaskan dalam debat agraria klasik yang dinyatakan baik oleh Kautsky maupun Lenin.
- 6) Dengan demikian kewajiban kader partai adalah: 1) melenyapkan sisa-sisa feodalisme, 2) mengambilalih tanah-tanah tuan tanah dan membagikannya kepada petani kecil, 3) partai

dan negara tidak boleh menyita tanah-tanah petani kaya (bukan tuan tanah), 4) Partai harus mendorong pemerintah agar melindungi petani sedang/menengah, 5) Partai harus mendorong negara menguasai perkebunan-perkebunan besar (nasionalisasi), 6) Partai harus mendorong dan memperbanyak kader-kadernya untuk bekerja di pedesaan untuk kalangan petani.

Untuk poin terakhir kemudian muncul slogan “3 Sama” (Sama Makan, Sama Kerja, Sama Tidur), maksudnya kader partai yang bekerja di pedesaan jangan menggurui petani, tinggal bersama petani, dan membantu memenuhi kehidupan petani sehari-hari serta produksi dari hal yang paling kecil dan remeh. Jika semua hal tersebut telah dilakukan dan kader partai telah menjadi bagian komunitas petani, barulah kader partai dapat mendidik petani agar lebih paham tentang situasi dan mampu menganalisis bahwa kaum tani harus berjuang secara politik ke tahap lebih lanjut, yaitu revolusi.

- 7) Menurut Aidit, revolusi sosialis di Indonesia pada dasarnya adalah revolusi agraria. Revolusi agraria adalah hakekat revolusi demokratik rakyat di Indonesia, tetapi tidak berhenti dan berakhir pada pembentukan sistem kepemilikan atau penguasaan tanah individu, karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya biarkan petani dibawah bimbingan partai yang menyadari sendiri bahwa memiliki tanah kecil tidak menguntungkan karenanya bersama dengan partai justru petani akan membangun kolektif-kolektif pertanian dan mengusahakannya dalam badan-badan usaha koperasi.

Akibat dari kebijakan ini, Massa BTI di pedesaan semakin bertambah karena mendapat simpati massa di pedesaan. Serta kepiawaian para organisir kaum komunis membangun blok-blok dalam organisasi-organisasi petani (BTI, SAKTI, dan RTI), ketiga organisasi ini secara bertahap berfusi ke dalam BTI, dimana RTI berfusi di tahun 1953, dan kemudian SAKTI pada tahun 1955 berfusi dengan BTI. Akibat fusi ini dan program-program yang menarik massa pedesaan, klaim jumlah basis massa BTI dari yang awalnya sekitar 120.000 anggota melonjak menjadi kurang lebih 3 juta anggota hanya dalam waktu yang singkat.

Petani kaya tidak dianggap musuh atau tidak disita tanahnya dalam pengorganisasian petani oleh PKI, karena tidak semua petani kaya jahat serta masih bisa bersimpati terhadap gerakan revolusioner. Yang penting mereka dididik untuk menjadi kawan strategis yang apabila sudah sadar akan dengan sendirinya mengubah kepemilikan individu tanahnya ke dalam tanah kolektif.

Menjelang tahun 1960 Pada Konferensi Petani I (1959) ditegaskan bahwa tugas revolusi adalah menumbangkan imperialisme dan kekuasaan tuan tanah feodal, menyita tanah-tanah tuan tanah feodal yang meski sudah menjadi isu tapi baru diagendakan partai di tahun 1959 dan baru menuntut penyitaan tanah-tanah milik orang asing serta tanah-tanah PRRI/Permesta dan DI/TII. Sikap terakhir sejalan dengan sikap politik partai yang mendukung pemerintahan Soekarno yang menganggap DI/TII dan PRRI -PERMESTA merupakan gerakan separatis di Indonesia.

Konferensi Petani II (1961) membahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendukung UUPBH No. 2/1960 yang mengharuskan kepenyakapan dan bagi hasil menjadi 50:50 dengan mengubah sistem tradisional yang merugikan petani penggarap. Meskipun sebenarnya PKI/BTI mempunyai hitungan yang lain untuk bagi hasil yaitu 60:40, dimana 60 untuk petani penggarap dan 40 untuk pemilik tanah. Tetapi sikap PKI dan BTI menyetujui hitungan dalam UUPBH karena dengan penghitungan yang rumit dan sesuai ketentuan UU tersebut maka jatuhnya tetap 60% bagian untuk petani. Untuk mendukung hal ini, sejak tahun 1959 telah dilakukan rangkaian Aksi Turun Sewa.
- 2) Gerakan “turun bunga” dan pembebasan tanah gadai sesuai dengan yang diatur dalam UUPA 1960
- 3) Koperasi sebagai wadah rakyat pekerja yang mandiri dan non-politik, tidak merupakan kegiatan politik.

- 4) Gerakan “6 Baik” yaitu 2 Turun (Turun Sewa dan Turun Bunga) serta 4 Naik (Naik Upah, Naik Produksi, Naik Kebudayaan, dan Naik Politik)
- 5) Landreform adalah syarat untuk pelaksanaan pembangunan nasional semesta.

Untuk lebih mematangkan pelaksanaan UUPA 1960, PKI juga melakukan penelitian tentang Keadaan desa dan Petani di awal tahun 1964. Sejalan dengan macetnya pelaksanaan Landreform yang diakibatkan kondisi internal di pedesaan pada waktu itu. Salah satu hasilnya adalah pembagian kelas-kelas desa dan sikap posisinya terhadap gerakan tani revolusioner, dengan pembagian sebagai berikut: (1) Tuan tanah, yang terdiri dari tuan tanah patriotik dan tuan tanah jahat; (2) kaum tani kaya; (3) kaum tani sedang; (4) kaum tani miskin/Semi Proletar Desa; (5) kaum Buruh Tani/Proletar Desa; (6) kaum Lintah darat, tukang ijon, tengkulak, Kabir, Bandit-bandit desa; (7) kaum Pekerja Kerajinan tangan dan pertukangan biasanya tani miskin dan buruh tani; dan (8) kaum intelektual dan Seniman Desa.

Didalam UUPA 1960 terkandung pelaksanaan Land Reform, yang bisa dimaknai sebagai “Agrarian based Nationalism”. Pelaksanaannya serumit perumusannya, dimana UUPA berupaya memadukan prinsip dan praktek-praktek hukum positif (positive law) dan “Living Law” yang dapat memuaskan/memenuhi kepentingan sejumlah kelompok politik. UUPA Produk hukum hibrida (hukum barat, adat dan Islam) yang tidak sempurna dan memerlukan negara yang kuat. Tetapi Patrick McAusland menyatakan bahwa UUPA merupakan karya besar karena adanya Semangat Nasionalisme, Keberpihakan kepada kaum kecil, Pemerataan/Kesejahteraan (Pelzer, 1982: 26-22). Syarat utamanya adalah yang kuat dan dukungan angkatan bersenjata.

Pelaksanaan Landreform memiliki prinsip-prinsip: Tanah untuk penggarap; Pembatasan penguasaan tanah; Ganti rugi atas pengambilan tanah privat yang kepemilkannya melebihi batas luas yang ditetapkan; dan Usaha tani dilakukan dalam koperasi-koperasi pertanian. Gencarnya percepatan pelaksanaan land reform ini mengundang berbagai aksi di kalangan rakyat pedesaan. Istilah “aksi Sepihak” muncul yang sesungguhnya tidak ditemukan dalam literatur –literatur PKI, yang ada adalah aksi mendorong pelaksanaan landreform berdasarkan UUPA dan UUPBH yang konsekuen.

Yang menjadi Obyek Landreform adalah (1) Tanah Kelebihan Maximum; (2) Tanah abseente; (3) Tanah Swapraja & eks Swapraja; dan (4) Tanah Negara Lainnya. Hal ini yang salah satunya menjadi tantangan bagi mereka yang tanah-tanahnya menjadi bagian dari objek land reform. Di dalam identifikasi objek land reform, banyak terjadi resistensi tuan-tuan tanah di pedesaan. Ketika menghadapi kecenderungan perlawanan ini, pemerintah yang menjadi pelaksana program ini pun tidak mampu bersikap tegas. Hal ini juga didukung dengan adanya resistensi kelompok militer (dalam hal ini terutama TNI-AD), karena mereka juga telah diberikan kuasa untuk menguasai tanah-tanah perkebunan eks kepemilikan asing pada tahun 1959. Gejolak politik 1965 merupakan salah satu dampak dari resistensi ini, Counter-revolutionary movements, dimana sudah banyak dinarasikan sebagai Kudeta Tentara dan pembunuhan massal. Pasca tragedy 1965, tanah-tanah yang sudah berhasil didistribusi diambil alih kembali dan mereka yang menjadi subjek penerima dalam program land reform di berikan stigma sebagai pengikut PKI.

Pasca peristiwa G30S merebak ketakutan akan komunisme yang berdampak pada upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam Land reform. Satu tim riset dari pemerintah di era Soeharto pada akhir 1970’an menyatakan bahwa bahwa banyak dari para penerima tanah dalam redistribusi tersebut menyatakan rasa bersalah menerima tanah dari Land Reform secara sosial serta rasa rasa berdosa menerima tanah yang bukan haknya. Konsekuensi negatifnya adalah (1) Tidak berubahnya ketimpangan struktur penguasaan tanah; (2) Perampasan Tanah (terus) berlangsung; (3) Tentara (terutama dalam hal ini TNI-AD) dan penguasa tanah negara skala besar makin kuat yang berujung pada konsentrasi penguasaan lahan; (4) Muncul dan menguatnya stigma komunis di pedesaan termasuk juga stigma bahwa land reform merupakan program komunis; (5) Lenyapnya konsepsi “Genuine Land reform” dari bumi Indonesia; (6)

sudah tentu pembangunan pedesaan dilaksanakan tanpa agenda reforma agrarian; (7) dan menghilangnya wacana “Debat agrarian” di Indonesia.

Pasca peristiwa 1965, BTI sebagai organisasi petani yang kuat dan mengakar di pedesaan serta mendukung kemenangan PKI dalam pemilu 1955 diberangus dengan cepat. Hal ini terjadi karena bukan hanya gerakan petani yang diberangus pada peristiwa 1965 tetapi semua yang berhubungan dengan komunisme ditumpas dengan segala cara serta adanya dukungan internasional hingga militia-militia di lokal yang bekerja dalam penumpasan itu. Ini memperlihatkan bahwa BTI sendiri tidak siap menghadapi situasi dan kondisi yang berlangsung pasca peristiwa 1965.

Yang terjadi pasca peristiwa 1965, gerakan perjuangan agraria bergerak tidak dipandu dengan perdebatan agraria. Dalam hal ini gerakan sosial pedesaan untuk reforma agraria terbangun nir-ideologi, hal ini dipengaruhi juga dengan mulai muncul “New Social Movement” pada dekade 1970’an. Gerakan sosial lebih mengutamakan membaca struktur kesempatan politik yang terbuka serta ideologi pragmatik ekonomi politik dari para pelakunya. Reforma agraria kemudian menjadi isu politik untuk menjaring voters dalam pemilu di masa sekarang, belum lagi semakin berkurangnya organisasi tani baik secara kualitas maupun kuantitas.

Meski demikian, Land reform masih relevan untuk dijalankan sebagai agenda pembangunan nasional terutama di pedesaan, untuk itu perlu organisasi sebagai mesin penggerak wacana perjuangan. Hal ini masih dipergunakan dalam pembangunan kekuatan organisasi massa tani di pedesaan.

Agrarian Resources Center (ARC)

Bandung, Mei 2017

Erwin Suryana